Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi XIII
Minggu ke-3 Juli
(14 s.d.20 Juli 2025)
2025

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PENUNDAAN IMPLEMENTASI DESAIN PASPOR MERAH PUTIH

Novianti
Analis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menunda implementasi desain paspor merah putih yang sedianya akan diterbitkan pertama kali pada peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025. Ditjen Imigrasi mengatakan, saat ini pihaknya fokus kepada peningkatan layanan. Keputusan ini diambil dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran bagi Kementerian dan Lembaga. Keputusan menunda implementasi desain paspor merah putih ini diambil setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat, dengan memperhatikan tingkat urgensi serta dinamika ekonomi yang tengah bergulir.

Kebijakan anggaran mendorong Ditjen Imigrasi untuk lebih selektif dalam merancang program kerja, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik. Salah satu prioritas utama adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kebutuhan masyarakat. Selain soal efisiensi, keputusan penundaan ini juga merupakan respons atas aspirasi masyarakat. Selama satu tahun terakhir, Ditjen Imigrasi memantau opini publik melalui media sosial, sejak desain paspor baru pertama kali diperkenalkan pada 17 Agustus 2024. Analisis terhadap 1.642 unggahan dari berbagai kanal media sosial memperlihatkan, bahwa masyarakat cenderung lebih menginginkan penguatan fungsi dan posisi paspor Indonesia di dunia internasional, ketimbang perubahan desain semata. Selain itu, dari sampel unggahan tersebut juga terlihat kecenderungan masyarakat kepada kebijakan pelayanan dengan dampak yang lebih konkret untuk dirasakan serta selaras dengan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan publik.

Ditjen Imigrasi berupaya memaksimalkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pengembangan serta pemeliharaan sistem berbasis digital. Inovasi tidak berhenti pada perubahan desain fisik, melainkan berupa penguatan sistem dan pelayanan yang lebih tepat guna. Oleh karena itu, ditundanya kebijakan desain paspor merah putih bukan berarti fokus untuk memperkuat paspor Indonesia berhenti dilakukan. Langkah strategis yang melibatkan instansi pemerintah terkait serta seluruh masyarakat Indonesia diperlukan, dan diharapkan semua pihak dapat saling mendukung guna memperkuat paspor Indonesia

Pemerintah akan fokus memperkuat paspor Indonesia di banyak negara dunia, dan meningkatkan keamanan digital hingga efisiensi pelayanan. Karenanya, pemerintah meminta masukan dan kritik dari banyak pihak, untuk terus memperkuat paspor Indonesia di mata dunia. Inovasi Ditjen Imigrasi akan terus berlanjut, dengan fokus pada pengembangan jangka panjang untuk memperkuat paspor Republik Indonesia melalui peningkatan keamanan digital dan efisiensi pelayanan.

Salah satu alasan penting di balik pembaruan desain paspor adalah untuk mengantisipasi ancaman keamanan, seperti teknik *morphing* wajah, yaitu penggabungan wajah dua individu untuk memalsukan identitas. Indonesia pun telah tergabung dalam jaringan *Public Key Directory* (PKD) dari International Civil Aviation Organization (ICAO) sejak 2019 untuk meningkatkan otentikasi dokumen perjalanan dan memerangi kejahatan lintas negara. Desain

paspor merah putih yang ditunda implementasinya, selain aspek visual, desain anyar ini juga membawa peningkatan dari segi keamanan. Fitur-fitur seperti *chip* biometrik, halaman biodata berbahan polikarbonat, dan teknologi pencetakan khusus untuk mencegah pemalsuan turut disematkan. Desain ini juga sejalan dengan standar dan rekomendasi dari ICAO.

Atensi DPR

Kebijakan Ditjen Imigrasi melakukan penundaan terhadap implementasi desain paspor merah putih merupakan langkah yang tepat mengingat kecenderungan masyarakat menginginkan kebijakan pelayanan dengan dampak yang lebih konkret untuk dirasakan serta selaras dengan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan publik. Hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran bagi Kementerian dan Lembaga. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI mendukung dan mengapresiasi kebijakan Ditjen Imigrasi dalam melakukan penundaan terhadap desain paspor merah putih. Komisi XIII DPR RI juga mendorong Ditjen Imigrasi untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pengembangan dan pemeliharaan sistem berbasis digital. Inovasi tidak hanya pada perubahan desain fisik, melainkan berupa penguatan sistem dan pelayanan yang lebih tepat sasaran.

Sumber

cnnindonesia.com, 18 Juli 2025;
detik.com, 18 Juli 2025;
kompas.com, 18 Juli 2025; dan
tempo.co, 20 Juli 2025.

Minggu ke-3 Juli
(14 s.d. 20 Juli 2025)

2025

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari
Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri
Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making